

**PARTISIPASI PEMUDA DALAM KONTESTASI POLITIK
DI KABUPATEN MAROS
(STUDI KASUS : PEMILIHAN CALON ANGGOTA
LEGISLATIF TAHUN 2019)**

AMUL HIKMAH

P022181028



**PEMINATAN MANAJEMEN KEPEMIMPINAN PEMUDA
PROGRAM STUDI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2019

TESIS
PARTISIPASI PEMUDA DALAM KONTESTASI POLITIK
DI KABUPATEN MAROS
(STUDI KASUS: PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019)

Disusun dan diajukan oleh

AMUL HIKMAH
Nomor Pokok P022181028

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal 7 September 2020

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

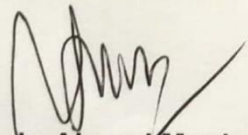
Menyetujui

Komisi Penasehat,


Dr. Ir. Abdul Rasyid J, M.Si
Ketua


Dr. Andi Muhammad Akhmar, S.S., M.Hum
Anggota

Ketua Program Studi
Perencanaan Pengembangan Wilayah, Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng


Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amul Hikmah

Nomor Mahasiswa : P022181028

Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 7 september 2020

Yang menyatakan,



AMUL HIKMAH

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT, yang atas izin-Nya tesis yang berjudul **“Partisipasi Pemuda Dalam Kontestasi Politik di Kabupaten Maros (Studi Kasus : Pemilihan Calon Anggota Legislatif Tahun 2019)”** ini akhirnya dapat terselesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor yang memengaruhi partisipasi pemuda dalam pemilihan calon anggota legislatif di Kabupaten Maros tahun 2019.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA sebagai pimpinan Universitas.
2. Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc atas segala perhatian dan dukungan selama saya menjadi mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
3. Kedua Pembimbing tesis saya, Dr. Abdul Rasyid J, M. Si dan Dr. Andi Muhammad Akhmar, M.Hum atas segala bimbingannya tesis ini mampu selesai dengan baik.
4. Para penguji, Prof. Dr. Ir. Yusran Jusuf, S. Hut, M.Si, Prof. Dr. Ahmad Munir, M.Eng, dan Dr. Rahmat Muhammad, M.Si atas segala masukan dan nasihatnya tesis ini mampu disempurnakan.

5. Kedua orang tua saya, Gagah Budi Agung dan Harida A. Baso, SH beserta seluruh saudara atas segala doa dan bantuan moral dan morilnya.
6. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan belajar pada Jurusan Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Konsentrasi Manajemen Kepemimpinan Pemuda, terkhusus Deputi Pengembangan Pemuda, Prof. Faisal Abdullah, SH, MH yang terus memberikan suntikan motivasi.
7. Ketua Prodi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Prof. Ahmad Munir, M.Eng beserta staf administrasi yang turut membantu selama proses akademik.
8. Saudara-saudara PPW-MKP 2018 yang juga Pengurus Forum Mahasiswa Beasiswa Kemenpora (FORBEK) Sekolah Pascasarjana Unhas yang tak henti-hentinya saling menguatkan selama proses ini.
9. Saudara-saudaraku di Argumentasi 2010 Unhas yang juga selalu hadir memberikan dukungan
10. Teman-teman di HPPMI Komisariat UNHAS-PNUP, FPBTI Sulsel, HPPMI Komisariat Tanralili yang juga menjadi bagian dalam proses penelitian berlangsung
11. Para ketua DPD KNPI Kab. Maros, Pemuda Pancasila Maros, Sapma Pemuda Pancasila Maros, GMNI Maros, Karang Taruna Maros, PP HPPMI Maros, PP-IMABSII yang turut mengantarkan saya mendapatkan beasiswa ini.

12. Para Caleg muda dan Pimpinan Parpol Kab. Maros yang telah bersedia menjadi narasumber saya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan serta keterbatasan dalam tesis ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membutuhkan.

Makassar, November 2020

Penulis

ABSTRAK

AMUL HIKMAH. *Partisipasi Pemuda dalam Kontestasi Politik di Kabupaten Maros (Studi Kasus: Pemilihan Calon Anggota Legislatif Tahun 2019)* (dibimbing oleh Abdul Rasyid J. dan Andi Muhammad Akhmar).

Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor yang memengaruhi partisipasi pemuda dalam pemilihan calon anggota legislatif Kabupaten Maros tahun 2019. Partisipasi pemuda adalah sebagai peserta pemilihan umum dari suatu partai politik.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Maros telah mencatat sebanyak 103 pemuda yang terlibat sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Maros pada tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan model deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan *focus group discussion* (fgd). Adapun informan berasal dari berbagai latar belakang partai politik dan organisasi kepemudaan. Penentuan informan tersebut dipilih secara sengaja (*purposive*). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros, dari Desember 2019 hingga Februari 2020.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemuda dalam kontestasi pemilihan calon anggota legislatif *terbagi* atas tiga yaitu idealisme pemuda, kuasa relasi dan modal, serta pelengkap syarat administratif. *Pertama*, idealisme pemuda berkaitan dengan pengalaman organisasi pemuda dan aktifitas selama menjadi mahasiswa di kampus. *Kedua*, kuasa relasi dan modal, memanfaatkan ketokohan dan modal besar orang tua pemuda tersebut untuk maju bertarung. *Ketiga*, pelengkap syarat administratif, berkaitan dengan regulasi pemilu yang memanfaatkan pemuda untuk turut serta sebagai peserta pemilu dan dilakukan oleh elit partai politik.

Kata kunci: Partisipasi; Pemuda; Politik; Pemilihan Umum



ABSTRACT

AMUL HIKMAH. *Youth Participation in Political Contestation in Maros District (Case Study: Election of Candidates for Legislatives Members 2019)* (Supervised by Abdul Rasyid J and Andi Muhammad Akhmar)

This study examines the factors that influence youth participation in legislative elections in Maros regency in 2019. The participation of youth is as participants in the election of a political party.

Based on data from the Regional Election Commission (Election Commission) Maros had recorded as many as 105 young men involved as a legislative candidate in Mares regency in 2019. The method used in this research is qualitative method with descriptive models. The data collection were done by interview, observation, and focus group discussion (FGD). The informants came from various backgrounds political parties and young organizations. Determination of informants were chosen intentionally (purposive). This study was conducted in Maros, from December 2019 until February 2020.

The results show that factors influence youth participation in legislative elections contestation is divide into three: the idealism of youth, power relations and capital, as well as the supplementary administrative requirements. The three factor means that: 1) Pertaining to the idealism of youth and youth organization is based on during a student activities on campus; 2) The power relations and capital, mean capital utilization, and the persona of parents of the young man to come forward to fight; and 3) Complementary administrative requirements, relates to regulation of elections that take advantage of youth to participate as election participants and carry out by a political party elite as well as the supplementary administrative requirements.

Keywords: Participation; Youth; Political; Election



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Konsep Pemuda	12
2.2. Teori Politik	15
2.3. Teori Partisipasi Politik	19
2.4. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik	26
2.5. Tipologi Partisipasi Politik	29
2.6. Penyebab Timbulnya Gerakan Partisipasi Politik	34
2.7. Penelitian Terdahulu	40
2.8. Kerangka Konseptual	45
2.9. Defenisi Operasional	46

BAB III. METODE PENELITIAN.....	49
3.1. Rancangan Penelitian	49
3.2. Lokasi Penelitian	51
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.4. Teknik Analisis Data.....	56
3.5. Instrumen Penelitian	57
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Maros	58
4.1.1. Kondisi Fisik dan Wilayah	58
4.1.2. Pembagian Administratif	59
4.1.3. Visi Misi Pemkab Maros	62
4.2. Kondisi Demografi.....	66
4.2.1. Kondisi Penduduk	66
4.2.2. Keadaan Sosial Budaya.....	67
4.3. Peta Politik dan Pemilih Pileg 2019 Kab.Maros.....	68
4.3.1. Data Pemilih.....	68
4.4. Peta Sebaran Caleg Muda Se-Dapil Kab.Maros 2019.....	75
4.5. Caleg Terpilih Kab.Maros Tahun 2019.....	79
4.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemuda Terlibat Sebagai Caleg Tahun 2019.....	82
4.6.1 Idealisme Pemuda	82
4.6.2 Kuasa Modal dan Relasi	91
4.6.3 Pemenuhan Syarat Admnistratif Partai	99
4.7. Orientasi Pemuda Menjadi Caleg Kabupaten Maros Tahun 2019	107
4.8. Proses Kontestasi Politik Caleg Muda Kab.Maros Tahun 2019	109
4.8.1. Kaderisasi Partai Politik.....	110

4.8.2. <i>Social Media Campaign</i>	113
4.8.3. Pembentukan Tim dan Kerja Terstruktur.....	120
4.8.4. <i>Door to Door Campaign</i> dan Pemberian Hadiah.....	123
 BAB V. PENUTUP	 128
5.1. Kesimpulan	128
5.2. Saran.....	129
 Daftar Pustaka	 130
Lampiran	136

Daftar Gambar

Gambar 1: Hierarki Partisipasi Politik	25
Gambar 2: Piramida Partisipasi Politik	32
Gambar 3: Kerangka Konsep	45
Gambar 4: Peta Kabupaten Maros	51
Gambar 5: Peta Sebaran Dapil Pileg Kab.Maros 2019.....	52
Gambar 6 : Peta Sebaran Caleg Muda Se-Dapil Kab.Maros 2019.....	76

Daftar Tabel

Tabel 1: Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 2: Pembagian Administratif Kabupaten Maros.....	60
Tabel 3: Jarak Antara Ibu Kota Kecamatan dan Pusat Pemerintahan di Kabupaten Maros	61
Tabel 4: Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin	66
Tabel 5: Banyaknya Penduduk Menurut Agama di Tiap Kecamatan Kab.Maros.....	68
Tabel 6: Data Pemilih Dapil Maros 1 Tahun 2019	69
Tabel 7: Data Pemilih Dapil Maros 2 Tahun 2019	70
Tabel 8: Data Pemilih Dapil Maros 3 Tahun 2019	71
Tabel 9: Data Pemilih Dapil Maros 4 Tahun 2019	72
Tabel 10: Data Pemilih Dapil Maros 5 Tahun 2019	74
Tabel 11: Data Sebaran Tempat Pemungutan Suara (TPS)	75
Tabel 12: Anggota DPRD Maros Terpilih Dapil 1	79
Tabel 13: Anggota DPRD Maros Terpilih Dapil 2	79
Tabel 14: Anggota DPRD Maros Terpilih Dapil 3	80
Tabel 15: Anggota DPRD Maros Terpilih Dapil 4	80
Tabel 16: Anggota DPRD Maros Terpilih Dapil 5	81
Tabel 17: Perbedaan Karakteristik Caleg Muda Berlatar Belakang Aktifis dan Pemodal.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Generasi muda merupakan generasi yang memiliki energi dan gagasan yang besar. Peranannya begitu besar besar dalam memberikan perubahan terhadap bangsa ini. Dalam pidato sang proklamator yakni Ir. Soekarno pernah mengatakan *“beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia”*, sebuah penegasan akan pentingnya kekuatan pemuda dalam memberikan pengaruh dunia. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan Syamsuddin (2008:9), ciri khas dari seorang pemuda adalah semangatnya yang menyala-nyala, Selain itu, pemuda secara fisik lebih kuat dibandingkan usia-usia di atasnya. Sehingga, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa usia muda adalah usia yang paling produktif dalam diri manusia.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009, pemuda didefinisikan sebagai manusia yang berusia 16 hingga 30 tahun. Usia muda merupakan masa perkembangan secara biologis dan psikologis. Selain itu, pemuda juga selalu memiliki aspirasi yang berbeda dengan aspirasi masyarakat pada umumnya. Dalam makna positif, aspirasi yang berbeda ini disebut dengan semangat pembaharu yang kreatif dan inovatif. Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional, contohnya dengan cara membangkitkan sikap kritis terhadap

kebijakan-kebijakan dari suatu pemerintahan, juga dapat berperan aktif sebagai agen-agen perubahan dengan cara meraih pendidikan politik agar menjadi agen yang lebih inovatif membawa perubahan yang lebih besar dan memberi manfaat yang banyak bagi masyarakat dan negara.

Berbagai bidang yang mampu pemuda jadikan sebagai upaya dalam pembangunan bangsa. Salah satunya adalah dalam bidang politik. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi politik. Dalam sebuah negara, demokrasi merupakan sesuatu yang substansial. Salah satu alasan yang mendasar terkait hal tersebut adalah karena salah satu indikator kualitas demokrasi ditentukan oleh tinggi dan rendah serta bagaimana partisipasi politik tersebut dilakukan. Kharisma (2014) menyebut partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Keterlibatan pemuda dalam panggung politik adalah sebuah upaya ideologis dalam memperjuangkan segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan dan semangat pemuda dianggap mampu untuk memecahkan segala persoalan bangsa.

Berbicara pemuda dan politik, bukanlah sesuatu hal yang baru diperbincangkan. Sejarah mencatat ragam peran pemuda dalam politik kebangsaan Indonesia. Onghokham (1977:15) menyebut kepemudaan dalam sejarah politik Indonesia selalu terkait dengan semangat penuh vitalitas dan revolusioner. Bahkan ada yang menempatkannya sebagai

aktor sejarah yang berperan sentral karena posisinya dalam berbagai peristiwa selalu dramatis dan lebih seru daripada dunia politik dewasa. Tidak hanya demikian, Jurdi (2012:30) pun menegaskan bahwa dalam sejarah panjang negara, peran pemuda dalam perpolitikan Indonesia telah mengalami dialektika dengan berbagai konteks sosio-kultural yang dihadapinya, jauh sebelum Indonesia merdeka, pemuda telah memperlihatkan partisipasi politik yang tinggi sebagai manifestasi dari keinginan untuk membebaskan diri dari belenggu kolonialisme dan imperialisme barat.

Ricklefs (2005:249) menuliskan gerakan-gerakan politik dan kebangsaan kita diawali dari pemikiran dan pergerakan kaum muda. Pada masa awal pergerakan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Berdirinya dipelopori oleh Pemuda Sutomo dan kawan kawan yang merasa tergugah hatinya dengan keadaan yang menimpa masyarakat Indonesia atau Jawa pada khususnya.

Pasca Perang Dunia II berakhir dan Jepang keluar sebagai pihak yang kalah, maka di Indonesia pada waktu itu yang berada dalam penguasaan Jepang terjadi kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*). Dalam kekosongan kekuasaan tersebut, pemuda menuntut Sukarno dan Hatta untuk segera memproklamkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Indonesia diproklamkan kemerdekaannya atas nama Sukarno-Hatta. Lahirlah apa yang disebut sebagai Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, yang menurut Anderson (1972) disebut sebagai revolusi pemuda.

Kemerdekaan dan kebebasan yang diperoleh masyarakat tidak terlepas dari kontribusi aktif kaum muda. Salah satu tokoh muda yang juga memegang peranan pada posisi struktural politik Indonesia adalah Sutan Syahrir. Pada usia yang masih sangat muda (30-an), ia telah menjadi Perdana Menteri pada akhir tahun 1940-an. Bahkan dalam beberapa periode, pengaruh kelompok Syahrir dalam politik Indonesia sangat menonjol dan berperan penting dalam proses pengambilan kebijakan pada periode awal kemerdekaan, inilah apa yang disebut oleh Harold Laswell dalam Jurdi (2012:32) sebagai sekelompok kecil yang memperoleh sebagian besar dari nilai apa saja, mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik.

Beberapa catatan sejarah di atas dapat kita menarik sebuah hipotesa tentang peranan pemuda begitu besar dalam konstalasi politik dan kebangsaan Indonesia. Tersebut pula rentetan gerakan kepemudaan pada tahun 1908, 1928, 1945, 1966, dan 1998. Itu membuktikan bahwa masa depan bangsa ada di tangan generasi muda selanjutnya (Toputiri, 2004:ix). Pula disebutkan Makhadi dalam Rimbawan (2013:24) menyebutkan bahwa pemuda adalah harapan bangsa. Ke depan mereka yang akan menjadi nahkoda bangsa ini. Sehingga, dapat dikatakan pemuda dan politik adalah dua elemen atau bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan suatu bangsa, karena dari sisi itulah pemuda kita dapat memberikan kontribusinya dalam pembangunan nasional karena tidak selamanya generasi sekarang akan terus bertahan.

Indonesia di era reformasi mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Salah satu bunyinya dalam Pasal 17 ayat 3 menerangkan bahwa peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan salah satunya adalah pendidikan politik dan demokratisasi. Khusus di Sulawesi Selatan, dikuatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan, Pada pasal 12 ayat 1 huruf c menerangkan pemuda berperan aktif sebagai agen perubahan dalam segala aspek pembangunan, yang secara lebih rinci Diperjelas dalam ayat (4) menerangkan peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan beberapa hal, salah satunya pendidikan politik dan demokratisasi. Atas dasar hukum inilah menjadi landasan konstitusional pemuda harus bergerak aktif dalam politik.

Shill (1960) mengkategorikan pemuda sebagai lapisan intelektual yang memiliki tanggung jawab sosial yang khas. Ia menyebutkan ada lima fungsi kaum muda yakni mencipta dan menyebar kebudayaan tinggi, menyediakan bagan-bagan nasional dan antar bangsa, membina keberdayaan dan bersama, mempengaruhi

perubahan sosial dan memainkan peran politik. Olehnya, partisipasi pemuda dalam ruang-ruang politik diharapkan mampu menaikkan taraf bangsa ini, sebagaimana pergerakan politik pemuda masa lampau.

Survey LIPI (2018) merilis bahwa usia pemuda yang memiliki hak pilih di Indonesia yakni sekitar 40 persen atau setara dengan 42 juta lebih pemilih. Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan dan peluang bagi negara dalam memberdayakan pemilih muda ini dalam bidang politik. Sehingga, proses-proses pendidikan dan kontestasi politik bangsa ini mampu menghasilkan nilai lebih bagi pembangunan nasional.

Miftahuddin (2014:251) menyebutkan pemuda sebagai bagian dari komponen bangsa, tentu tidak dapat melepaskan diri dan menghindar dari politik. Oleh karena hakikat manusia, termasuk pemuda adalah sebagai *zoon politicon* atau mahluk politik. Keberadaan dan kiprah manusia termasuk pemuda merupakan bagian dari produk politik dan terlibat langsung maupun tidak langsung, nyata maupun tidak nyata dalam aktifitas politik. Sama halnya yang dikatakan Jurdi (2015: 277), memotret peran dan partisipasi politik kaum muda dalam pentas politik Indonesia sangat penting bagi upaya memahami eksistensi politik kaum muda.

Kontestasi politik belakangan ini memperlihatkan bahwa kaum muda lebih banyak membentuk komunitas-komunitas atau kelompok pemenangannya sendiri dalam sebuah kontestasi politik. Sifatnya pun

hanya sementara dan tidak berkepanjangan. Pemuda terlibat di luar struktural ruang politik yang legal, partai politik salah satunya. Dalam kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan pada tahun 2017 dan 2018 misalnya, terdapat komunitas yang diberi nama Teman Ahok dan Pemuda-NA yang merupakan komunitas pemenang kontestan tertentu yang dihuni oleh kaum-kaum muda. Mereka memiliki gaya tersendiri dalam pergerakan-pergerakan politiknya. Bentuknya bersifat konvensional, Gabriel Almond (dalam Mas'ood dan MacAndrews 2000:67) menyebutkan yang dimaksud bentuk konvensional adalah partisipasi politik seperti pemberian suara (*voting*), ikut dalam diskusi politik, ikut kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, melakukan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi. Partisipasi ini adalah bentuk kesukarelaan politik dalam demokrasi yang semakin dewasa di Indonesia. Padahal, negara telah memberikan mandat kepada partai politik untuk memberikan pendidikan dan ruang politik bagi generasi muda, namun nihil realitas.

Pemilihan umum 2019 merupakan Pemilihan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan calon anggota legislatif (caleg) mulai dari tingkatan pusat hingga daerah. Ada fenomena baru dalam perhelatan kontestasi politik di tahun tersebut. Terkhusus dalam pemilihan calon anggota legislatif di tingkatan daerah yang diwarnai dengan keterlibatan

beberapa golongan muda sebagai kontestan atau peserta. Kaum muda telah berani tampil untuk mengisi posisi struktural partai politik dan ikut berkompetisi merebut kursi kekuasaan. Hal ini memberikan simbol lahirnya gen baru dalam politik. Abugaza (2013: 1) menyebut gen dalam politik, bisa diartikan sebagai budaya politik yang mencerminkan perilaku politik individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Adapun pembawa gen dalam politik adalah arus informasi yang menjadi preferensi masyarakat.

Masih Abugaza (2013: 2) menyebut ada tiga hal utama yang harus dipenuhi ketika gen ini terbentuk.

1. Menciptakan kelompok masyarakat yang berisi kumpulan generasi muda yang tidak memiliki beban terhadap masa lalu.
2. Membentuk konektivitas dengan dunia luar, konektivitas dengan dunia luar bisa diciptakan dengan internet atau media sosial.
3. Memiliki basis keilmuan (etika, kepakaran, dan profesionalisme) yang baik.

Ketiga kriteria di atas dianggap mampu dimiliki oleh pemuda-pemuda yang terlibat sebagai peserta pemilu. Sebagai gen baru dalam politik, penulis tertarik untuk melihat atau menganalisis lebih dalam

terhadap faktor pengaruh dan model pergerakan yang dilakukan oleh caleg-caleg muda yang ada di daerah sebagai bagian dari partisipasi politik.

Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang melaksanakan giat pemilihan calon anggota legislatif. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maros tahun 2018 menunjukkan jumlah usia pemuda (usia 16-30 tahun) di daerah ini sebanyak 92.069 jiwa. Sekitar 40 persen dari jumlah total penduduk di Kabupaten Maros. Banyaknya jumlah usia muda menjadi tantangan dan peluang tersendiri bagi daerah ini dalam mendudukkan kaum mudanya dalam kursi anggota legislatif.

Data Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Maros mencatat dari 413 total calon anggota legislatif yang menjadi kontestan, 103 diantaranya masuk dalam kategori pemuda. Setara dengan 25 persen pemuda yang terlibat sebagai peserta pemilu di Kabupaten Maros yang dibagi dalam lima daerah pemilihan (Dapil) diantara empat belas kecamatan dalam kontestasi pemilihan caleg 2019. Hal inilah yang menjadi perhatian dan ketertarikan penulis untuk menganalisa partisipasi pemuda sebagai kontestan di lima daerah pemilihan tersebut dengan *track record* atau histori personal pemuda tersebut di daerah pilihannya masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dengan judul ***“Partisipasi Pemuda dalam Kontestasi Politik di Kabupaten Maros (Studi Kasus : Pemilihan Calon Anggota Legislatif 2019).***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, maka peneliti membuat fokus penelitian :

1. Apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi pemuda untuk turut serta sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Maros?
2. Bagaimana proses politik pemuda sebagai kontestan pemilihan calon anggota legislatif tahun 2019 di Kabupaten Maros?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis faktor-faktor pengaruh yang mendorong pemuda untuk turut serta dalam kontestasi calon anggota legislatif tahun 2019 di Kabupaten Maros.
2. Menganalisis proses politik pemuda yang turut serta sebagai peserta dalam pemilihan calon anggota legislatif tahun 2019 di Kabupaten Maros.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Diharapkan dapat berguna serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai pengembangan pengetahuan tentang proses politik pemuda di kalangan akademisi, serta diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Serta menjadi tambahan acuan penerapan pendidikan politik pemuda di Kabupaten Maros.

2. Secara Praktis

Untuk dijadikan acuan atau sebagai sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat berguna dalam menunjang keberhasilan peningkatan partisipasi politik. Dan juga sebagai bahan pertimbangan akan pentingnya pendidikan politik pemuda dalam era millennial ini, sehingga tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan baik dan sesuai tujuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pemuda

Ben Anderson dalam Karina (2008) mengatakan bahwa Pemuda yang merupakan motor aktif sosial masyarakat adalah Individu-individu potensial untuk dibentuk dan digarap sebagai objek sekaligus subjek serta merupakan mata rantai yang menghubungkan masa sekarang dan masa depan. Persepsi pemuda bukanlah suatu kata yang pengertiannya semata bergantung pada indikator usia, dan pemuda adalah pengertian yang lebih tepat untuk menunjukkan kualitas dan semangat, Peranan pemuda pada masa itu selalu menempati posisi yang menentukan proses sosial politik dalam Negara dan masyarakat. Mereka begitu tegar dalam memperjuangkan kemerdekaan mengusir kolonialisme baik secara fisik maupun pemikiran.

Satries (2009:88) menyebut salah satu langkah pemuda untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik adalah dengan partisipasi aktif pemuda Indonesia dalam upaya pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah suatu proses melalui usaha dan prakarsa masyarakat sendiri maupun kegiatan pemerintahan dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya.

Oktavijani (2013) pula menuturkan bahwa pemuda sebagai generasi penerus juga memiliki kemampuan potensial yang bisa diolah menjadi kemampuan aktual. Selain itu juga memiliki potensi kecerdasan intelektual, emosi dan sosial, berbahasa, dan kecerdasan seni yang bisa diolah menjadi kecerdasan aktual yang dapat membawa mereka kepada prestasi yang tinggi dan kesuksesan. Mereka memiliki potensi moral yang dapat diolah dan dikembangkan menjadi moral yang positif sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara yang penuh dengan kejujuran, tidak korup, semangat yang tinggi dan bertanggungjawab.

Karina (2008) menuliskan analisa kepemudaan dalam konsep dapat ditinjau dari tiga dimensi, yaitu: *Pertama*, dimensi pembangunan nasional yang dalam konteks ini generasi muda diarahkan untuk dipersiapkan untuk menjadi kader-kader bangsa yang utuh dan paripurna. *Kedua*, dimensi kebutuhan pembangunan yang diharapkan kader-kader sebagai angkatan kerja yang berbudi, dinamis, kreatif, terampil, berjiwa pengabdian dan berjiwa kepeloporan serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar. *Ketiga*, dimensi regenerasi, diharapkan kader-kader menjadi patriot bangsa, penerus nilai-nilai serta cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Masih Karina (2008), pemuda memiliki tanggungjawab atas masa depan pembangunan bangsa, sebagaimana dicatat dalam “Deklarasi Pemuda Indonesia” bahwa, “Pemuda Indonesia adalah ahli waris cita-

cita bangsa yang sah dan sekaligus adalah generasi penerus, yang telah ikut meletakkan dasar-dasar kemerdekaan bangsa Indonesia, dengan melewati simponi perjuangan yang panjang”. Pemuda adalah ahli waris yang sah, sekaligus adalah generasi penerus yang memiliki tanggung jawab besar, dengan demikian memiliki moralitas (integritas), komitmen dan kesungguhan dalam mengimplementasikan tanggung jawabnya tersebut.

Pembangunan pemuda menjadi program penting bagi setiap negara di dunia, karena pemuda merupakan aset terbesar bangsa sekaligus tumpuan harapan yang akan menegakkan kembali cita-cita bangsa, selain itu pemuda juga merupakan bagian dari roda perputaran zaman yang diharapkan kembali dapat menjadi *agent of change* (Dewanta dan Syaifullah, 2008: 46). Peran dan partisipasi pemuda sangat penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara selalu berusaha untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan karakter pemuda. Ada peribahasa yang mengungkapkan bahwa barang siapa menguasai pemuda, maka akan menguasai masa depan (Tilaar, 1991: 34). Pada dasarnya pemuda memiliki peran yang sentral untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Needs Theory menyebutkan bahwa tingkatan tertinggi dari tujuan hidup manusia adalah aktualisasi diri (Abugaza, 2013: 2) . Idealisme dan semangat tinggi pemuda harus diwujudkan dalam

bentuk aktualisasi. Tidak boleh “mati” di atas kertas dan tulisan tembok-tembok saja. Panggung politik dalam ruang demokrasi bisa menjadi salah satu alternatif dalam menata sistem yang telah diwariskan sebelumnya. Dengan terjunnya pemuda ke dunia politik maka diharapkan membawa perubahan-perubahan dalam demokrasi kita ke arah yang lebih baik lagi.

Krisnawati (2014), peran politik pemuda dapat dilihat dari: *Pertama*, partisipasi politik pemuda sebagai bagian dari sistem politik yakni dalam supra struktur politik dan infrastruktur politik. Dalam suprastruktur politik, pemuda merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sistem pemerintahan. Sebagai warga negara setiap pemuda harus memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, termasuk melakukan bela negara. Dalam infrastruktur politik, pemuda dapat berkiprah dalam kegiatan partai politik, pada kelompok kepentingan, kelompok penekan maupun kelompok anomalis. Inilah arena politik yang dapat digunakan oleh pemuda dalam berpartisipasi.

2.2. Teori Politik

Secara umum struktur yang terdapat dalam suatu sistem politik terdiri dari kelompok-kelompok kepentingan partai-partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi, dan badan-badan peradilan. Selanjutnya ada yang memilah struktur politik ini menjadi struktur yang bersifat informal dan struktur yang bersifat formal. Struktur politik yang sifatnya informal meliputi (Sastroatmodjo, 1995: 110-111).:

1. Pengelompokan masyarakat atas dasar persamaan sosial ekonomi seperti golongan tani, golongan buruh, kelas menengah, kelompok cendekiawan, dan sebagainya. Pengelompokan semacam ini walaupun tidak nampak dalam wujud sebuah organisasi atau perkumpulan, masing-masing memiliki jenis aspirasi tertentu yang berbeda satu sama lain serta mewarnai proses penentuan kebijaksanaan dalam suatu sistem politik.
2. Pengelompokan masyarakat atas dasar perbedaan cara, gaya di satu pihak, dan pengelompokan atas dasar kesadaran akan adanya persamaan jenis-jenis tujuan di pihak lain, sehingga dapat dikatakan sebagai kelompok asosiasional politik. Pengelompokan itu, misalnya menghasilkan: golongan organisasi sosial politik golongan administrator, kelompok agama, kelompok militer, golongan administrator, kelompok agama, kelompok militer, golongan cendekiawan, golongan pengusaha, golongan seniman, dan sebagainya, yang masing-masing berbeda dalam cara, gaya, jenis, dan nilai tujuannya.
3. Pengelompokan masyarakat atas dasar kenyataan dalam kehidupan politik rakyat. Masing-masing mengemban fungsi dan peranan politik tertentu, dan secara konvensional dikenal dalam sistem politik. Pengelompokan itu misalnya menjadi; Partai politik, golongan kepentingan (*interest group*), tokoh politik, dan

media komunikasi politik. Pengelompokan yang disebut terakhir ini sifatnya nampak sebagai struktur politik masyarakat terorganisir dalam sebuah organisasi tertentu, akan tetapi berbeda dengan struktur politik pemerintahan.

Teori Montesque menjelaskan bahwa yang termasuk lembaga politik formal adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain teori Montesque, teori Van Vollenhoven menjelaskan bahwa lembaga lembaga politik formal itu meliputi lembaga yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, dan kepolisian. Termasuk pula dalam lembaga politik formal ini adalah kelompok birokrasi, yang terutama berfungsi sebagai pelaksana kebijaksanaan politik yang diambil oleh pemerintah (Sastroatmodjo, 1995:110-111).

Setiap sistem politik terdiri dari dua struktur politik, yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur disebut juga *the rule* atau penguasa, yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan infrastruktur atau *the ruled* adalah masyarakat beserta organisasi yang dibentuknya. Infrastruktur politik meliputi partai politik/organisasi politik, ormas, pers, kelompok kepentingan, kelompok penekan, asosiasi-asosiasi, LSM, dan informasi *leader* (Aini, 2004: 105). Almond dan Powell yang dikutip Handoyo (2013: 158), menjelaskan dalam telaah sosiologi politik, struktur politik tidak hanya dipahami sebagai pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan atau sistem politik,

tetapi lebih dari itu ia mengerti sebagai seluruh aktivitas yang dapat diamati yang membentuk sistem politik. Aktivitas-aktivitas tersebut memiliki struktur, sama dengan mengatakan bahwa terdapat suatu keajegan dalam aktivitas-aktivitas itu.

Firmansyah (2008: 52) memaparkan, siapapun yang terlibat dalam dunia politik akan akrab dengan kekuasaan, kepentingan, dan konflik. Motif utama dalam berpolitik adalah untuk mendapatkan kekuasaan yang terlegitimasi. Artinya pihak yang mendapatkan kekuasaan akan memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum baik di tingkat lokal maupun nasional. Mekanisme mendapatkan kekuasaan ini dilakukan melalui konflik yang diatur oleh sistem perundang-undangan. Firmansyah juga memaparkan bahwa konflik tidak selalu dikonotasikan kepada hal-hal negatif. Seperti halnya pendapat yang dikutip dari Amason yang membagi konflik ke dalam dua hal, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional adalah konflik yang memberikan ruang dinamika dan tukar menukar ide dan gagasan, konflik jenis ini menghasilkan hal-hal positif. Sementara konflik disfungsional merupakan konflik yang berakibat pada hal-hal negatif.

Politik (*politics*) secara terminologis dapat diartikan sebagai berikut misalnya, Laswell memberikan pengertian secara klasik (*classic formulation*) tentang politik, yaitu “*politics as who gets what, when and how*”. Miriam Budiardjo mengartikan politik yaitu bermacam-macam

kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengertian yang lebih komprehensif tentang politik dikemukakan Ramlan Surbakti yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu (Cholisin dan Nasiwan, 2012: 1).

2.3. Teori Partisipasi Politik

Konsep partisipasi dalam proses pembangunan memiliki arti yang dalam. Hal ini tercermin dari pendapat atau interpretasi yang diteorikan para ahli maupun pengelola pembangunan mengenai pentingnya partisipasi sebagai salah satu elemen yang menentukan keberhasilan pembangunan (Tangkilisan, 2005: 320).

Agustino (2007:58) menyebut partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Akan tetapi, keputusan politik

menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

Budiardjo (2008:367), partisipasi politik mengungkapkan pada dasarnya studi tersebut hanya lebih fokus pada partai politik sebagai pelaku utama, akan tetapi dengan berkembangnya demokrasi analisis partisipasi politik pun diperluas. Dalam analisa politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara berkembang banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempegaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum.

Teori demokrasi klasik memandang bahwa warga negara tertarik untuk dan mau berpartisipasi dalam politik. Karena mereka berpartisipasi dalam proses politik, sesuai dengan aturan dan menggunakan nilai-nilai. Dalam teori demokrasi klasik ini, partisipasi politik dipercaya sebagai alat untuk memperoleh kebijakan yang diharapkan. Kaase dan Marsh dalam Mujani (2007:54) berpendapat bahwa partisipasi politik sesuai dengan unsur-unsur pemerintahan demokrasi lainnya, seperti rasionalitas, kontrol, member respon yang cepat, fleksibilitas, legitimasi dan resolusi konflik.

Partisipasi dalam hal ini, berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik berupa kebijakan publik. Agustino (2007:58) membagi kegiatan warga Negara menjadi dua, yakni :

1. Mempengaruhi isi kebijakan umum, dan
2. Ikut membuat dan melaksanakan keputusan politik.

Partisipasi politik merupakan perilaku politik, tetapi perilaku politik tidak selalu berupa partisipasi politik. Secara literal, Agustino (2007:59) menyebutkan partisipasi politik adalah, kegiatan legal oleh warga perorangan yang secara langsung atau tidak ditunjuk untuk mempengaruhi pilihan petinggi pemerintah atau tindakan mereka. Membatasi lingkup partisipasi politik juga diungkapkan oleh Parry, Mosley dan Day yang mengatakan sebagai, keikutsertaan dalam proses formulasi, pengesahan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Jika demikian, maka kepedulian utama dari partisipasi politik tindakan yang dilakukan oleh warga yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil hanya oleh perwakilan rakyat dan para pejabat pemerintah. Karenanya tidak dapat disangsikan lagi bahwa partisipasi politik lebih dihubungkan dengan demokrasi politik yang membuka ruang bagi aspirasi masyarakat sipil dalam sesungguhnya.

Herbert McClosky dalam Budiarjo (2008: 367) menuliskan partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang

diambil pemerintah. Istilah “partisipasi politik” telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Herbert McClosky mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi politik sebagai:

“The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy” (Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum) (Budiarjo, 2008: 367).

Definisi yang dikemukakan McClosky tersebut menitikberatkan pada tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain itu, hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam partisipasi politik yaitu adanya tindakan sukarela dari warga masyarakat tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Sedangkan Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson dalam Miriam Budoarjo (2008:368) memaknai partisipasi politik sebagai:

“By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision -making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective ”. (Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi -pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif).

Menurut Surbakti, yang dikutip oleh Cholisin dan Nasiwan (2012: 145) bahwa partisipasi politik memiliki pengertian keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sedangkan menurut Miriam Budiardjo (2008) mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, dan mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

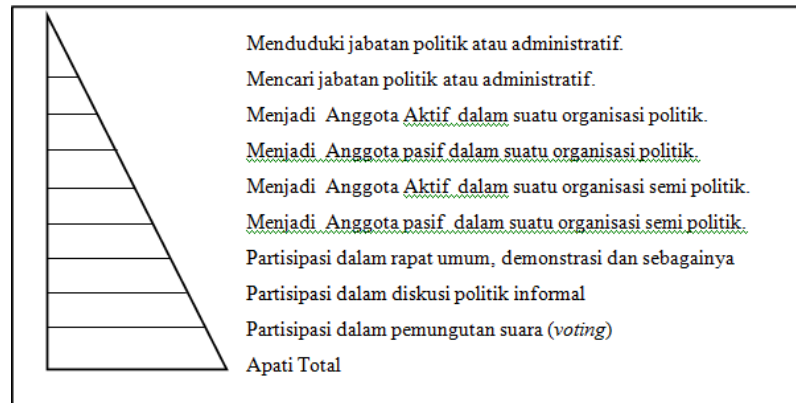
Surbakti (2010:180) juga memberikan pengertian yang sejalan dengan pengertian partisipasi politik di atas yakni partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut serta menentukan pimpinan pemerintahan. Partisipasi politik tersebut didefinisikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh warga negara biasa.

Pakar ilmu politik Huntington dan Nelson dalam Anwar (2015:77) telah membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom dan partisipasi yang dimobilisasi atau digerakkan oleh pihak lain. Partisipasi yang otonom, itu merupakan partisipasi yang dilakukan secara sukarela oleh warga negara yang dapat dikatakan sebagai

bentuk dari efektifnya sosialisasi politik dan komunikasi politik. warga negara yang pada umumnya berpendidikan, sadar akan hak dan kedaulatan yang dimiliki serta yakin dan percaya bahwa keterlibatannya dalam berbagai kegiatan politik memiliki manfaat dan efek politik. sebaliknya, partisipasi politik yang dimobilisasi adalah bentuk partisipasi politik yang tidak suka rela, tetapi digerakkan oleh partai politik, kandidat, tim sukses atau pejabat pemerintah. Warga Negara yang pada umumnya kurang berpendidikan, belum menyadari hak dan kedaulatan yang dimilikinya, sehingga perlu digerakkan.

Menurut Rush dan Althoff dalam Damsar (2010:185) hierarki tertinggi dari suatu partisipasi politik adalah menduduki jabatan politik atau administratif. Sedangkan hierarki yang terendah dari suatu partisipasi politik adalah orang yang apati secara total, yaitu orang yang tidak melakukan aktivitas politik apapun secara total. Semakin tinggi hierarki partisipasi politik maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan orang-orang, seperti yang diperlihatkan oleh bagan hierarki partisipasi politik, dimana garis vertikal segitiga menunjukkan hierarki, sedangkan garis horizontalnya menunjukkan kuantitas dari keterlibatan orang-orang.

Gambar 1 : Hierarki Partisipasi Politik



Sumber: Rush dan Althoff dalam Damsar (2010:185)

Gambaran yang telah dituangkan oleh Rush dan Althoff di atas dapat kita asumsikan bahwa semakin tinggi tingkat atau keinginan suatu masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik semakin kecil jumlah masyarakat yang terlibat di dalamnya. Namun sebaliknya semakin ke bawah tingkatannya semakin kecil peluang masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik. Apa yang telah dijelaskan Rush dan Althoff dari hirarki tersebut bahwa bentuk partisipasi politik secara umum dan luas serta lebih mudah diamati di lingkungan masyarakat kita ialah pemberian suara pada Pemilu.

Partisipasi politik dalam pemberian suatu tersebut ialah dipilih secara langsung anggota DPR/MPR, DPRD, DPD dan presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota oleh masyarakat. Demokrasi rakyat menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica)

dengan kekuasaan negara yang dipilih oleh rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Damsar, 2010:186).

2.4. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Bermacam-macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan berbagai waktu. Secara umum, Rahman (2007:287-288) membagi partisipasi politik menjadi dua bentuk, antara lain partisipasi politik Konvensional dan partisipasi politik Non-Konvensional.

Partisipasi konvensional meliputi:

1. Pemberian suara (*voting*)
2. Diskusi politik
3. Mengikuti kegiatan kampanye politik
4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan dan
5. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative

Sedangkan partisipasi politik Non-Konvensional adalah meliputi:

1. Pengajuan petisi
2. Berdemonstrasi
3. Konfrontasi
4. Mogok
5. Tindakan kekerasan politik harta benda (Perusakan.
Pemboman, pembakaran)
6. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (Penculikan,
pembunuhan)

7. Perang gerilya dan revolusi.

Surbakti (2010: 184-185) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Surbakti menjelaskan yang dimaksud kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah.

Kedua faktor tersebut bukan faktor-faktor yang berdiri sendiri (bukan variabel yang independen). Artinya, tinggi rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan kepemilikan kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapatan, pengeluaran, ataupun pemilikan benda-benda berharga. Seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya

memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Perilaku politik warga negara dalam bentuk partisipasi politik oleh Milbrath dijelaskan dalam kaitannya dengan empat faktor utama. Pertama sejauh mana orang menerima perangsang politik. Kedua karakteristik pribadi seseorang. Ketiga karakteristik sosial seseorang dan keempat ialah keadaan politik atau lingkungan politik tempat seseorang dapat menemukan dirinya sendiri (Sastroatmodjo, 1995: 15).

Terdapat dua variabel yang mempengaruhi partisipasi politik warga negara biasa. Dua variabel itu adalah kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah (sistem politik). Dua variabel tersebut tidaklah berada pada kutub yang berlawanan sekaligus menentukan sikap dan perilaku warga Negara dalam perilaku politiknya, tetapi berada secara integral dengan faktor-faktor lain seperti status sosial, status ekonomi, afiliasi politik, dan pengalaman berorganisasi. Status sosial berarti kedudukan seseorang dalam kelompoknya yang disebabkan baik oleh tingkat pendidikan maupun oleh pekerjaan. Tingkat status sosial yang tinggi memungkinkan perilaku politik yang lebih berkualitas dari seseorang yang berada dalam status sosial dibawahnya. Status sosial ekonomi ialah kedudukan seorang warga negara dalam pelapisan sosial yang disebabkan oleh pemikiran kekayaan. Dengan status sosial ekonomi yang tinggi diperkirakan

seseorang akan memiliki tingkat pengetahuan politik, minat, dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan yang tinggi pada pemerintah (Sastroatmodjo, 1995:15).

2.5. Tipologi Partisipasi Politik

Ada beberapa cara dalam membuat kategori atau tipologi partisipasi politik. Menurut Surbakti, Miriam Budiardjo, Mas"oed, dan Mc Andrews (Cholisin dan Nasiwan, 2012:147-152) penggolongan partisipasi politik, misalnya penggolongan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif, partisipasi politik dari dimensi stratifikasi sosial, dan berdasarkan jumlah pelaku, partisipasi politik berdasarkan tinggi rendahnya kedarasan politik, frekuensi dan intensitasnya, konvensional dan non konvensional. Tipologi politik tersebut yakni:

1. Penggolongan berdasarkan Partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

Partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi proses output. Sastroatmodjo (1995: 74) menjelaskan partisipasi aktif mencakup kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternative kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak, dan ikut serta dalam

kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan. Di pihak lain, partisipasi pasif, antara lain, berupa kegiatan mentaati peraturan/perintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.

2. Penggolongan Partisipasi politik dilihat dari dimensi stratifikasi sosial.

Menurut Olsen, partisipasi politik dilihat dari dimensi stratifikasi sosial, meliputi enam lapisan, yaitu pemimpin politik, aktivis politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi politik lainnya kepada orang lain), warga negara, marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan politik), dan orang yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik).

3. Penggolongan Partisipasi berdasarkan jumlah pelaku.

Penggolongan partisipasi politik berdasarkan jumlah pelaku, yakni individual dan kolektif. Maksudnya seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Sedangkan yang dimaksud partisipasi kolektif ialah kegiatan warga Negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum.

4. Penggolongan Partisipasi politik berdasarkan tinggi rendahnya kesadaran politik.

Paige, dengan merujuk pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem politik) membagi partisipasi politik menjadi empat tipe. Partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal, dan partisipasi pasif. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasinya cenderung aktif. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan apatis). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan jika kesadaran politiknya sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

5. Penggolongan partisipasi politik berdasarkan frekuensi dan intensitas

Berdasarkan penggolongan ini, maka partisipasi politik dibedakan menjadi aktivis, partisipan, dan pengamat. Partisipasi politik berdasarkan frekuensi dan intensitas, digambarkan dalam bentuk piramida partisipasi sebagai berikut.



Gambar 2 : Piramida Partisipasi Politik
Budiardjo (Cholisin, 2012: 150)

Berdasarkan gambar piramida partisipasi bagian paling atas adalah aktivis yang meliputi pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai atau kelompok kepentingan. Bagian partisipan meliputi petugas kampanye, anggota aktif dari partai atau kelompok kepentingan, aktif dalam proyek-proyek sosial. Bagian pengamat meliputi menghadiri rapat umum, anggota partai atau kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media massa, dan memberikan suara dalam pemilihan umum. Bagian paling bawah pada piramida partisipasi tersebut adalah apolitis.

6. Penggolongan partisipasi politik dalam konvensional dan non konvensional

Gabriel Almond, dalam sosialisasi, kebudayaan dan partisipasi politik (Cholisin, 2012: 150) mengenalkan partisipasi politik digolongkan menjadi konvensional dan non konvensional. Kegiatan politik yang konvensional adalah partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non konvensional termasuk beberapa yang mungkin legal seperti petisi dan yang ilegal, seperti tindakan politik penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas politik integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.

Milbrath dan Goel (Sastroatmodjo, 1995: 74-75), membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama adalah apatis, yaitu orang yang menarik diri dari proses politik. Kedua adalah spektator, yaitu berupa orang-orang yang setidaknya-tidak pernah ikut dalam pemilihan umum. Ketiga adalah gladiator, yaitu orang-orang yang aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat. Keempat adalah pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Kegiatan partisipasi politik itu meskipun kelihatannya hanyalah menyangkut soal pemberian suara sebenarnya juga menyangkut juga semboyan-semboyan yang diberikan dalam kampanye,

bekerja untuk membantu pemilihan, membantu di tempat pemungutan suara, mencari dukungan untuk calon, dan tindakan-tindakan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Meskipun demikian, harus disadari bahwa kegiatan pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik kolektif yang besar yang telah membedakannya dari partisipasi politik yang lain (Sastroatmodjo, 1995: 78).

2.6. Penyebab Timbulnya Gerakan Partisipasi Politik

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya berbagai hal yang pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Berdasarkan fenomena ini maka W. Page memberikan model partisipasi menjadi empat tipe (Rahman, 2007: 289), yakni:

1. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif.
2. Sebaliknya kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.
3. Kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah lemah maka perilaku yang muncul adalah militant radikal.

4. Kesadaran politik rendah tetapi kepercayaan pada pemerintah tinggi maka partisipasinya menjadi sangat pasif, artinya hanya berorientasi pada output politik.

Faktor kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah bukan faktor yang berdiri sendiri (variabel independen artinya tinggi rendahnya kedua faktor itu dipengaruhi faktor status sosial dan ekonomi, infiliasi politik orang pengalaman berorganisasi oleh karena itu hubungan dari faktor-faktor itu dapat digambarkan sebagai berikut: status sosial dan ekonomi, afiliasi politik, pengalaman berorganisasi merupakan variabel pengaruhindependent. Kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah sebagai variabel antara intervening variabel dan partisipasi politik merupakan variabel terpengaruh (dependen).

Menurut Myron Weiter (dalam Syahrial, 2011: 123-124), terdapat lima penyebab timbulnya gerakan kearah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut.

1. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.

3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern. Ide demokrasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
4. Konflik antar kelompok pemimpin politik. Jika timbul konflik antarelite maka yang dicari adalah dukungan rakyat, terjadi perjuangan kelas menengah melawan kaum aristocrat, telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.

Pemerintah memiliki keterlibatan yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. Hal serupa juga dipaparkan oleh Agustino (2007: 59) bahwa partisipasi politik, entah itu dalam mempengaruhi isi kebijakan ataupun ikut memformulasi dan mengimplementasikan atas konten kebijakan, akan timbul dan meningkat apabila, *Pertama*, terjadinya modernisasi. Modernisasi terjadi ketika penduduk kota baru, seperti: buruh, pedagang, dan kaum professional merasa mereka dapat mempengaruhi nasib mereka sendiri melalui pelibatan dirinya dalam setiap aktivitas pemerintahan, maka dengan asumsi yang telah terbangun tersebut mereka makin menuntut untuk ikut aktif dalam proses kepolitikan.

Kedua, lahir dan meningkatnya partisipasi publik dapat dipengaruhi juga oleh perubahan-perubahan struktur kelas sosial masyarakat. Ketika perubahan sosial terjadi lambat laun akan terbentuk suatu klas-klas sosial baru yang sama sekali tidak pernah ada dalam masyarakat tradisional sebelumnya. Salah dua dari terbentuknya klas-klas sosial baru adalah klas pekerja baru dan klas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi. Persoalan atau masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik dalam masyarakat yang telah berubah di mana legitimasi tradisional tercerabut dari tempatnya menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik publik pula.

Ketiga, pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern. Melalui kaum intelektual dan media komunikasi modern, ide demokratisasi partisipasi telah tersebar ke bangsa-bangsa baru merdeka jauh sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang. Melalui dua institusi inilah kemudian terdorong partisipasi politik publik yang bergelombang. Tidak dapat dipungkiri bahwa Reformasi 1998 di Indonesia juga memberikan dampak luas terhadap gerakan-gerakan demokratisasi di seluruh dunia setelahnya.

Keempat, bahwa partisipasi dalam masyarakat semakin meningkat oleh karena adanya konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik.

Kelima, keterlibatan pemerintah luas dalam urusan sosial, ekonomi, dan budaya ternyata menuai kriti yang pada akhirnya memeperluas partisipasi politik warga. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah diberbagai perikehidupan sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir dari warga untuk ikut serta secara aktif dalam pembuatan keputusan publik. Karena warga berasumsi bahwa monopoli kebijakan yang dilakukan pemerintah hanya akan menciptakan kebijakan-kebijakan yang tak implementatif dan akan bias kebutuhan.

Milbrath (Sastroatmodjo, 1995) memberikan empat alasan bervariasi partisipasi politik seseorang. *Pertama* berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbarth menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi, dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. Meskipun demikian dalam menanggapi perangsang-peransang politik itu tentu dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, nilai-nilai, pengalaman-pengalaman, dan kepribadian yang dimiliki seseorang. Seorang individu akan merasa mampu memecahkan permasalahan-permasalahan politik yang ada, apabila ia cukup

memiliki informasi dan bahan-bahan mengenai permasalahan tersebut yang diperolehnya dari perangsang politik yang diterimanya. Sebaliknya orang yang merasa tidak memiliki informasi tentang permasalahan tersebut akan cenderung memilih diam dan merasa tidak memiliki kemampuan untuk menyumbangkan pemikiran dalam mengatasi masalah politik itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa informasi politik dan pengetahuan politik yang dimiliki seseorang memiliki arti penting dalam mempengaruhi keterlibatan seseorang dalam partisipasi politik.

Kedua yaitu berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang yang meliputi status ekonomi, karakter suku, usia, jenis kelamin, dan keyakinan atau agama. Faktor-faktor tersebut merupakan karakteristik sosial yang memiliki pengaruh terhadap partisipasi seseorang dalam politik. Karakter-karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor itu pulalah yang memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasinya. Alasan ketiga menyangkut sifat dan sistem partai tempat seorang individu itu hidup. Hal ini menyangkut sistem politik dan sistem kepartaian yang didapat di lingkungan politiknya. Seseorang yang hidup dalam negara-negara demokratis, partai-partainya cenderung mencari dukungan massa dengan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik. Alasan Milbrath yang keempat ialah berupa perbedaan regional. Perbedaan regional ini merupakan aspek

lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang ikut mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik seseorang (Sastroatmodjo, 1995: 93-94).

Dalam kenyataannya tindakan politik warga negara itu memang selalu bergerak dari tidak terlibat sama sekali, terlibat secara terbatas sampai terlibat secara penuh dalam kegiatan politik. Mereka yang tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan politik dalam arti sikap masa bodoh atau apati (*apathy*) dapat disebabkan karena: (1) sikap acuh tak acuh, (2) tidak tertarik pada politik, (3) kurang mengerti masalah politik, atau (tidak yakin bahwa usaha dalam mempengaruhi kebijakan publik akan berhasil. Meskipun demikian apati (*apathy*) itu selain dapat diartikan negatif, juga dapat memberi arti positif. McClosky menyatakan bahwa sikap masa bodoh atau apati itu berguna dalam memberikan fleksibilitas kepada sistem politik, karena kalau semua warga negara itu aktif dalam kegiatan politik, justru dapat menimbulkan pertikaian, fragmentasi stabilitas sebagai konsekuensi ketidakpuasan politik (Arifin, 2015: 211-212).

2.7. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan partisipasi politik adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Penelitian terdahulu

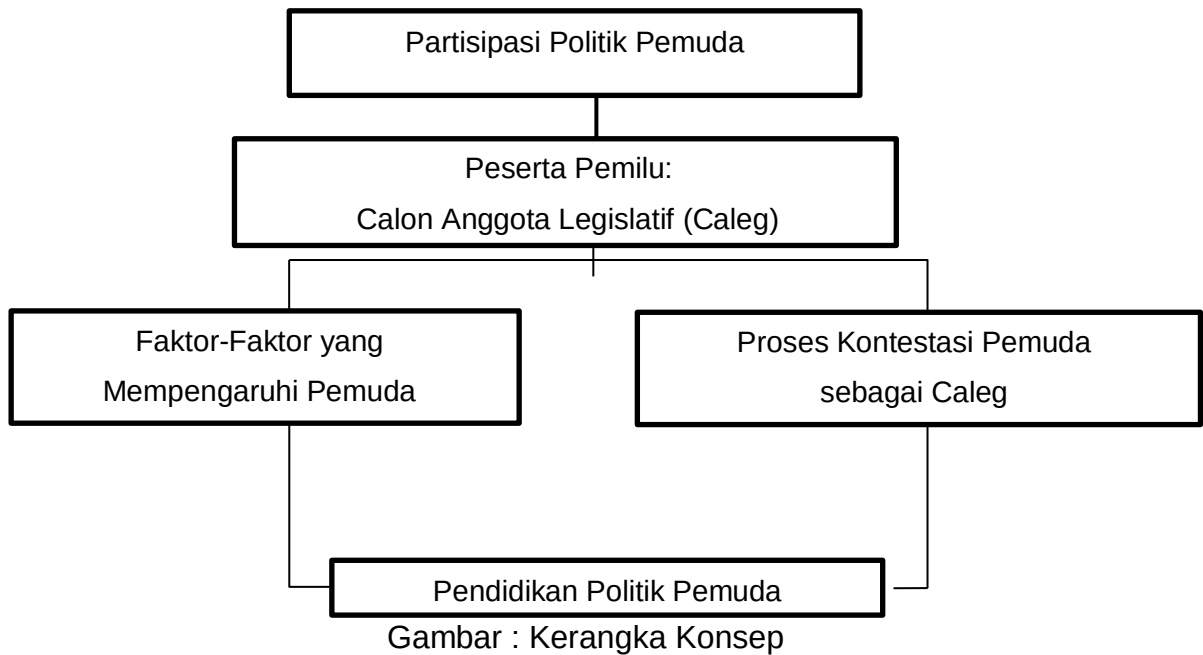
No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	Cice Verawati R. L (2009)	Perilaku pemilih kaum muda pada pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kolaka Utara	Metode Kualitatif model deskriptif, meneliti di lapangan dan bertemu langsung dengan pemilih secara langsung.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pemilihan legislatif tahun 2009 di kabupaten kolaka utara kondisi kaum muda tidaklah sama. Terdapat kaum muda yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan informasi dan rasionalitas. Selain itu, terdapat pula kaum muda yang menggunakan hak pilihnya tapi memiliki informasi yang sangat minim terhadap pemilihan.

2	Marlin (2010)	Partisipasi politik masyarakat pada pilkada tahun 2010 (penelitian di Desa Batunilamung Kec. Kajang Kab. Bulukumba	Kualitatif Deskriptif, Penelitian tersebut menfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pilkada, khususnya masyarakat desa Batunilamung Kec. Kajang. Dalam penelitian tersebut tentu jelas berbeda dengan penelitian penulis yang fokusnya pada partisipasi pemuda.	Hasil penelitian tersebut yang menggunakan teori “Elit” dan teori “Pilihan Rasional” (rational choice) menjelaskan bahwa dalam partisipasi politik yang dimaksud di atas kebanyakan yang terlibat adalah masyarakat berpendidikan serta masyarakat menengah ke atas.
3	Muhammad Saleh, dkk (2014)	Strategi Komunikasi Politik: Keterlibatan Pemuda dalam Pemenangan Chaidir Syam Pada Pemilihan Legislatif Tahun	Kualitatif Deskriptif, Penelitian tersebut menfokuskan pada satu figur politik sebagai salah seorang caleg tahun 2014 di Kab.Maros. Bertatap muka dan menelusuri	Penelitian ini mengkaji dan menunjukkan bagaimana pola dan strategi komunikasi pemenangan seorang calon anggota Legislatif bernama Chaidir Syam yang

		2014 di Kabupaten Maros	histori seorang Chaidir Syam. Dalam penelitian tersebut letak perbedaanya dengan penelitian penulis adalah objek dan pola pendekatan yang digunakan.	merupakan peraih suara tertinggi di Kabupaten Maros pada pileg 2014.
4	Penelitian oleh Rizka Fimmastuti, dkk. (2017)	Persepsi Dan Tindakan Politik Pemuda Terhadap Gerakan Jogja Independent (JOINT) dalam Pelaksanaan Pilwalkot Kota Yogyakarta Tahun 2017 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Pemuda (Studi	Mengamati persepsi para pemuda (relawan) sekaligus political action mereka terhadap gerakan independen di Kota Yogyakarta tahun 2017.. Pengalaman dan pandangan youth as active citizens terhadap proses di dalam gerakan telah berkontribusi pada ketahanan politik	Pada awalnya pemuda sangat optimis dengan organisasi ini. Namun mereka menilai bahwa strategi dan pengorganisasian gerakan masih kurang matang dan kurang menysasar masyarakat akar rumput. Di samping itu, para relawan juga belum memiliki ruang untuk mengakomodasi

		Pada Relawan Jogja Independent (JOINT) di Kota Yogyakarta)	pemuda.	kepentingan pemuda, karena mereka hanya dilibatkan dalam teknis administratif semata. Meskipun secara substansi pemuda belum memiliki ruang sama seperti di dalam parpol, pemuda mendapatkan pengalaman dan pembelajaran berpolitik melalui gerakan.
--	--	---	---------	---

2.8. Kerangka Konseptual



Gambar : Kerangka Konsep

Berdasarkan pada kerangka pemikiran tersebut, dapat dijelaskan bahwa tesis ini akan menggali kecenderungan partisipasi politik pemuda secara formal termasuk dalam kerangka *politic participatory*, dimulai dengan penjelasan makna partisipasi politik pemuda sebagai kontestan pemilu kemudian membahas faktor apa saja yang mempengaruhi atau mendorong pemuda untuk terlibat sebagai kontestan serta proses politik yang dapat digolongkan ke dalam kesuksesan ataupun kegagalan pemuda dalam mendapatkan kursi legislatif. Penekanannya adalah dari segala gejala yang ditemukan, akan memberikan sebuah pandangan bagaimana pendidikan politik pemuda yang berkualitas atas dasar corak dan karakter politik pemuda.

Penelitian ini membahas tentang kepemudaan, peranan serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh para pemuda dalam ranah perpolitikan di Kabupaten Maros. Tujuannya adalah terwujudnya kesadaran partisipasi dan pendidikan politik pemuda dalam proses pembangunan dan nilai kebangsaan di Kab. Maros.

2.9. Definisi Operasional

2.9.1. Pemuda

Sudah sejak lama, pemuda dijadikan sebagai tumpuan masa depan bangsa, bahkan pemuda dianggap sebagai miniatur masa depan (50 tahun kedepan) (Setiawan, 2016:29). Kita bakal bisa memprediksi masa depan sebuah bangsa dilihat dari pemudanya saat ini. Pemuda sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang muda. Sementara dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan dijelaskan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun.

Karakteristik yang dimiliki oleh pemuda yang dijelaskan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2009 yaitu, memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik. Melihat karakteristik pemuda yang begitu kompleks sudah selayaknya pemberdayaan pemuda dilakukan.

Pemuda yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mereka yang berusia 16-30 tahun dan ikut serta dalam kontestasi pemilihan calon anggota legislatif 2019 di Kabupaten Maros

2.9.2. Partisipasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partisipasi didefinisikan sebagai turut berperan serta dalam suatu kegiatan; peran serta. Sedangkan Suryono (2001:124) memberikan definisi, partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Partisipasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peranan atau keikutsertaan pemuda sebagai calon anggota legislatif dalam kontestasi pemilihan umum sebagai bagian dari pembangunan demokrasi.

2.9.3. Politik

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memberikan definisi politik :

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan,
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain,
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah);kebijakan.

Sedangkan Budiarjo (2005 : 8) mendefenisikan politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu..

Politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah kegiatan demokrasi negara yang dilakukan oleh pemuda Kabupaten Maros.